

DUA MOMEN SAKRAL DALAM ACARA PELANTIKAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO: HEGEMONI RUANG-WAKTU, PROPAGANDA POLITIK HUMANISME PALESTINA, DAN WACANA KRITIS VAN DIJK

Rafi Ferdiansyah¹, Soraya Nurfadhilah Devi Chantikha²

^{1,2}Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surel: ¹03010420011@student.uinsby.ac.id, ²03030423094@student.uinsby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membaca pesan propagandis yang disampaikan dalam dua momen sakral yang terjadi pada saat acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8. Dua momen sakral ini terjadi ketika Muzani, sebagai Ketua MPR RI, membuka sidang dan ketika Prabowo Subianto, sebagai presiden, menyampaikan pidato kenegaraan. Sakralitas kedua momen tersebut disebabkan karena kehadiran negara lain yang notabene tidak sepenuhnya pro Palestina; beberapa ada yang netral bahkan kontra. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan perspektif wacana kritis Van Dijk sebagai telaaahnya. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kedua momen sakral tersebut menempatkan negara lain yang hadir sebagai subjek yang terhegemoni secara ruang dan waktu. Pidato yang disampaikan dalam kedua momen tersebut memiliki tendensi sebagai propaganda politik humanisme dalam menyikapi konflik di Palestina. Konklusi dalam penelitian ini adalah bahwa bahasa merupakan alat untuk mengontrol, membentuk persepsi, dan mempengaruhi masyarakat melalui penguasaan terhadap konteks tertentu, dalam hal ini adalah mengenai konsep ruang dan waktu.

Kata kunci: dua momen sakral, hegemoni ruang dan waktu, humanisme Palestina, wacana kritis Van Dijk

Abstract

This research aims to read the propagandist messages conveyed in two sacred moments that occurred during the Inauguration of the 8th President and Vice President of the Republic of Indonesia. These two sacred moments occurred when Muzani, as the Chairman of the MPR RI, opened the session and when Prabowo Subianto, as president, delivered a state speech. The sacredness of the two moments was due to the presence of other countries that were not entirely pro-Palestine; some were neutral or even against. This study uses a qualitative descriptive method by utilizing Van Dijk's critical discourse perspective as its study. The results of this study state that the two sacred moments place the other countries present as subjects that are hegemonized in terms of space and time. The speeches delivered in the two moments tend to be humanist political propaganda in responding to the conflict in Palestine. The conclusion in this study is that language is a tool to control, shape perceptions, and influence society through mastery of certain contexts, in this case regarding the concepts of space and time.

Keywords: two sacred moments, hegemony of space and time, Palestine humanism, Van Dijk's critical discourse

A. PENDAHULUAN

Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu fenomena kebangsaan yang sarat pesan politis dan hegemonik. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam gedung MPR RI yang sakral ini setidaknya menjadi sorotan penting: bahwa pemerintah Indonesia secara diplomatis menempatkan posisinya sebagai negara yang pro Palestina dalam konflik Timur Tengah. Pemerintah Indonesia secara propagandis menyampaikan hal yang dianggap tabu tersebut, yang mana fenomena ini tidak hanya memantik dalam skala domestik saja, tetapi juga internasional (Khan, 2022). Perlu diketahui, bahwa acara pelantikan ini dihadiri oleh

perwakilan dari 35 negara, sebagai berikut: 1. Amerika Serikat, 2. Rusia, 3. Britania Raya, 4. Korea Selatan, 5. Tiongkok, 6. Arab Saudi, 7. Serbia, 8. Jerman, 9. Kepulauan Solomon, 10. Muslim *Council of Elders*, 11. Vanuatu, 12. Malaysia, 13. Laos, 14. Vietnam, 15. Filipina, 16. Qatar, 17. Australia, 18. Selandia Baru, 19. Thailand, 20. Singapura, 21. Mesir, 22. Turki, 23. Papua Nugini, 24. Persatuan Emirat Arab, 25. Kamboja, 26. Brunei Darussalam, 27. India, 28. Yordania, 29. Jepang, 30. Italia, 31. Kanada, 32. Prancis, 33. Timor Leste, 34. Brasil, 35. Fiji. Dari keseluruhan negara yang hadir tersebut jelas memiliki keberagaman sikap politik dalam menciptakan dinamika tersendiri ketika meresepsi konflik Israel dan Palestina, yang dalam momen tersebut tidak dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai seremonial, tetapi juga menjadi panggung politik internasional yang sarat pesan propagandis.

Dalam konteks ini, pesan kemanusiaan terhadap Palestina disampaikan dalam dua momen yang sakral, yakni saat Ketua MPR membuka sidang dan ketika Prabowo Subianto memberikan pidato kenegaraan. Ketika Ketua MPR membuka sidang, pesan solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina disampaikan secara formal dan diplomatis sekaligus memberikan sinyal bahwa isu Palestina bukan hanya menjadi perhatian Indonesia, tetapi juga diangkat ke hadapan dunia internasional yang diwakili oleh perwakilan negara-negara yang hadir. Selanjutnya, dalam pidato perdananya sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto juga kembali menegaskan pesan kemanusiaan yang kuat terhadap Palestina. Di sini, pesan ini bukan sekadar ungkapan politik biasa, tetapi mencerminkan konsistensi sikap Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Penyampaian ini sangat relevan, mengingat komposisi negara yang hadir, dengan beberapa di antaranya memiliki hubungan dekat dengan Israel atau bahkan mendukung kebijakan Israel.

Kedua momen ini memiliki nilai sakral yang propagandis dalam konteks penyampaian wacana politik kepada perwakilan negara yang hadir. Pertama, pada saat Ketua MPR membuka sidang yang mana ruang sidang MPR menjadi pusat kekuasaan yang simbolik. Di hadapan 35 negara dengan sikap politik beragam, pesan kemanusiaan yang disampaikan terhadap Palestina muncul sebagai pernyataan diplomatik formal yang memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam momen ini, sakralitas terletak pada penguasaan ruang oleh institusi legislatif tertinggi yang membawa wacana kemanusiaan ke dalam konteks geopolitik global. Dalam konteks yang lebih penting, dominasi ruang politik ini merupakan wacana yang digunakan untuk menanamkan ideologi solidaritas kepada negara-negara yang mungkin bersikap netral atau mendukung Israel, sekaligus juga mempertegas bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan bagian integral atas narasi kebangsaan maupun kebijakan luar negeri yang tak tergoyahkan.

Selanjutnya, ketika Prabowo memberikan pidato kenegaraan sebagai Presiden terpilih, sakralitas waktu menjadi elemen kunci. Momen ini tidak lagi dipersepsi sebagai pelantikan kepala negara saja, melainkan tonggak sejarah politik Indonesia yang merepresentasikan arah kebijakan luar negeri yang akan diambil di masa depan. Dalam momen yang penuh perhatian global, Prabowo menegaskan kembali pesan kemanusiaan terhadap Palestina, sekaligus meneguhkan posisinya dan Indonesia dalam konflik ini. Pesan tersebut diucapkan secara gamblang di hadapan negara-negara yang memiliki sikap beragam terhadap Palestina, dan hal ini tentu menjadi bentuk propaganda politik yang cerdas. Dalam kapasitasnya sebagai presiden, Prabowo memanfaatkan ruang waktu

sakral dalam rangka menyampaikan pesan yang berpotensi membangun narasi tandingan terhadap negara-negara pro-Israel, sekaligus menantang secara seremonial posisi negara-negara netral dengan menyoroti isu kemanusiaan sebagai elemen moral-etik global.

Pada akhirnya, fenomena ini merupakan proses terjadinya aktivitas dominasi antara ruang dan waktu, yang mana hal tersebut terejawantahkan dalam kedua momen tersebut, yakni ketika pembukaan sidang oleh Ketua MPR dan pidato Prabowo. Melalui perspektif wacana kritis Van Dijk, pesan kemanusiaan yang disampaikan sama sekali tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan dan ideologi yang mengikutinya (Van Dijk, 2008). Dengan hadirnya negara-negara yang bersikap netral atau bahkan pro Israel, momen ini menjadi lebih kompleks dan sublim lagi, bagaimana kemudian pesan kemanusiaan tidak lagi diwujudkan melalui pernyataan dukungan saja, melainkan berwujud perlawanan simbolis yang seremonial terhadap dominasi geopolitik global yang sering kali mengabaikan hak-hak Palestina sebagai korban dari konflik kemanusiaan.

Perhatian atau bentuk dukungan terhadap Palestina ini jamak ditemui dalam konteks penelitian mutakhir, seperti Ardiansyah dkk (2024), Thoyyibah dkk (2023), Ridhwani (2024), yang serupa menggunakan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 sebagai bentuk dukungan perjuangan Palestina. Selanjutnya, Sormin dkk (2024) yang membicarakan tentang bagaimana kesadaran politik, nilai-nilai religius, dan sosial mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih atau memboikot produk tertentu yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan pro-Israel. Selanjutnya, Rosita dkk (2024) yang membicarakan tentang dua fatwa atau keputusan MUI yang dianggap bertentangan: satu yang mendorong dukungan terhadap Palestina melalui boikot produk yang terlibat dalam mendukung Israel, dan satu lagi yang berkaitan dengan sertifikasi halal bagi produk dari perusahaan yang tidak jelas posisinya terhadap konflik Palestina-Israel.

Selanjutnya, Sumadi (2024) yang membicarakan tentang pemetaan komprehensif mengenai gerakan sosial selama periode 2023-2024; demonstrasi, kampanye media sosial, penggalangan dana, hingga advokasi politik di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Selanjutnya, Masnani dkk (2024) yang mengeksplorasi tentang semiotika semangka, khususnya yang berwarna merah, hijau, putih, dan hitam, merepresentasikan bendera Palestina dan menjadi lambang perlawanan serta solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Selanjutnya, Azizah dkk (2024) yang mengkaji berbagai kampanye digital yang diluncurkan oleh akun Twitter @Erlanishere, termasuk penggunaan tagar, citra visual, dan retorika solidaritas yang berhasil menarik perhatian dan partisipasi dari audiens global dalam memobilisasi dukungan dan simpati publik terhadap perjuangan Palestina.

Terakhir, Syauqiyah dkk (2024) yang membicarakan tentang strategi diplomasi publik yang dilakukan oleh Elcorps, melalui produk mode mereka, Palestine Scarf, dari merek Elzatta: produk fashion sebagai media untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Keseluruhan penelitian di atas memang menawarkan aneka rona dukungan terhadap Palestina, namun tidak menempatkan suatu bentuk dukungan yang sifatnya adalah *face to face*. Sedangkan dalam isu penelitian ini, pernyataan bentuk dukungan terhadap Palestina diungkapkan secara *face to face* terhadap 35 negara yang diundang dalam forum serah terima jabatan presiden baru tersebut. Dua momen sakral: pembukaan sidang ketua MPR dan sambutan Prabowo Subianto, setidaknya menempatkan negara yang hadir dalam kondisi terdominasi oleh situasi ruang dan waktu. Bagaimana kemudian

wacana dengan bebas tersalurkan tanpa adanya represi dalam bentuk kondisi yang memungkinkan.

B. KAJIAN TEORI

Wacana kritis Teun Van Dijk merupakan salah satu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis hubungan antara wacana dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Van Dijk berfokus pada bagaimana wacana, baik lisan maupun tulisan, digunakan untuk mereproduksi, meneguhkan, atau melawan bentuk-bentuk kekuasaan dan dominasi dalam berbagai konteks sosial (Van Dijk, 1993). Pendekatan ini menekankan bahwa wacana tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang lebih luas, terutama dalam hal ideologi, politik, dan kekuasaan. Wacana kritis Van Dijk melihat bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, membentuk persepsi, dan mempengaruhi publik melalui penguasaan terhadap konteks tertentu.

Kerangka konsep teoretik Van Dijk menguraikan wacana dalam tiga dimensi utama: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Van Dijk, 2015). Dimensi teks melibatkan analisis linguistik terhadap kata-kata, frasa, struktur kalimat, dan retorika yang digunakan dalam wacana. Analisis ini mencari elemen-elemen yang mencerminkan kekuasaan dan ideologi yang dibawa oleh pembicara atau penulis. Dimensi kognisi sosial berfokus pada pemahaman bahwa wacana mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses kognitif individu maupun kelompok, seperti bagaimana stereotip, prasangka, dan pengetahuan bersama terbentuk dan berfungsi dalam wacana. Pada dimensi ini, Van Dijk menekankan pentingnya skema mental yang digunakan individu dalam memaknai dan memahami suatu wacana.

Dimensi terakhir, yakni konteks sosial, menekankan bagaimana wacana diproduksi dan diterima dalam kerangka sosial yang lebih luas. Konteks ini mencakup hubungan kekuasaan yang ada di masyarakat, dimana wacana berperan sebagai alat untuk mempertahankan atau menantang dominasi sosial (Setiawan et al., 2022). Dalam hal ini, wacana yang disampaikan dalam konteks politik sering kali digunakan sebagai alat propaganda atau untuk mengukuhkan status quo. Dengan demikian, wacana kritis Van Dijk tidak hanya memeriksa isi teks, tetapi juga mempelajari konteks kekuasaan yang menyertainya serta bagaimana wacana tersebut mempengaruhi pemikiran dan tindakan sosial.

Sikap geopolitik dunia terhadap konflik Palestina-Israel sangat kompleks dan beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan strategis, aliansi politik, serta faktor historis dan ideologis yang mendasari hubungan antarnegara. Secara umum, sikap geopolitik dunia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: dukungan penuh terhadap Palestina, dukungan terhadap Israel, dan posisi netral atau ambigu. Negara-negara yang mendukung Palestina, seperti Turki, Iran, dan sebagian besar negara di dunia Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menekankan pentingnya pengakuan atas hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka, mengakhiri pendudukan, dan menghormati resolusi PBB yang terkait (Wati & Burdah, 2024). Dukungan ini sering kali berakar pada solidaritas agama, budaya, dan komitmen terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Politik humanisme Palestina dalam konteks penelitian ini diterapkan sebagai landasan moral dan ideologis yang terintegrasi dalam konstruksi wacana selama momen pelantikan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto. Wacana tersebut tidak hanya

menyuarakan dukungan terhadap hak asasi rakyat Palestina saja, melainkan juga membangun narasi solidaritas global yang menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan dengan tanggung jawab politik internasional. Dalam pidato-pidato resmi, politik humanisme ini seringkali diterjemahkan melalui retorika yang menggugah emosi dan kesadaran kolektif, memanfaatkan simbol-simbol sejarah, seperti pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah, untuk memperkuat legitimasi moral atas dukungan terhadap Palestina.

C. METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan model kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan paradigma wacana kritis Van Dijk untuk membaca pesan kemanusiaan terhadap Palestina yang disampaikan pada momen pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak dan catat. Melalui teknik simak, peneliti dapat mengamati secara cermat jalannya acara pelantikan, memperhatikan dengan teliti setiap pernyataan, bahasa tubuh, dan reaksi dari perwakilan negara yang hadir. Informasi ini kemudian dicatat secara rinci, termasuk transkrip dari pembukaan sidang oleh Ketua MPR dan pidato Prabowo Subianto.

Adapun teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dari pengamatan dan pencatatan diuraikan secara rinci dan dianalisis berdasarkan kerangka teori analisis wacana kritis Van Dijk. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana kekuasaan, ideologi, dan politik hadir dalam penyampaian pesan kemanusiaan, serta bagaimana wacana tersebut membentuk persepsi audiens, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan metode deskriptif, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pesan sosial politik di balik momen sakral tersebut dan implikasi politis yang ditimbulkannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Palestina-Israel jamak disikapi sebagai sesuatu yang pelik untuk diuraikan satu per satu. Pasalnya, fenomena ini selalu berkepanjangan sehingga membuat soliter kemanusiaan selalu dinamis bergantung pada situasi apa yang menimpa mereka pada saat itu. Palestina, sebagai objek yang tertindas, selalu mendapatkan aneka rona dukungan kemanusiaan, baik dalam bentuk logistik maupun moral. Namun, tidak seluruh regional sepenuhnya mendukung, terdapat beberapa negara yang lebih memilih bersikap netral, atau bahkan tidak mendukung adanya pembelaan kemanusiaan. Dalam momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8 ini, pemerintah menghadirkan delegasi sebanyak 35 negara. Titik problematisnya bahwa keseluruhan negara yang hadir tidak sepenuhnya mendukung Palestina sebagai entitas yang diberangus hak-hak humanisnya. Beberapa dikenal sebagai pendukung Palestina, seperti Qatar, Yordania, dan Turki, dalam konteks sesama muslim (Dalacoura, 2021). Sementara yang lain, seperti Amerika Serikat yang memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Israel (Gilboa, 2023), begitu juga dengan Britania Raya (Jones, 2021). Sementara itu, negara-negara seperti Jepang yang lebih bersikap netral (baca: ketidaktergantungan) meskipun terdapat hubungan diplomatik (Brummer & Oren, 2023).

Fokus analisis pada artikel ini adalah menyoroti tentang dua momen sakral yang terjadi ketika Muzani sebagai Ketua MPR RI sedang memimpin forum, dan ketika

Prabowo sedang menyampaikan pidato kenegaraan. Dalam konteks ini, delegasi negara yang hadir pada saat itu bisa dikatakan terdominasi secara ruang-waktu: karena tidak adanya hak apapun selain sebagai pendengar. Van Dijk mengatakan bahwa wacana sejatinya merupakan aksesoris propagandis untuk mempertahankan atau menentang dominasi sosial (Setiawan et al., 2022), dalam konteks ini adalah isu mengenai konflik kemanusiaan Palestina-Israel yang semakin hari kian berkecamuk tanpa adanya titik temu yang selesai. Pada akhirnya, inti dari pembahasan ke depan akan menguraikan bagaimana wacana bekerja secara otonom melalui momentum yang tepat, juga bagaimana kelompok yang terwacanakan menjadi subjek yang terintimidasi secara ruang dan waktu yang bersamaan dalam konteks psikologis tanpa bisa melakukan perlawanan apapun.

1. Pembukaan Sidang oleh Ketua MPR: Hegemoni Wacana dalam Ruang Kekuasaan

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni kenegaraan, tetapi juga menjadi momen strategis dimana pesan ideologis dan diplomatik dapat disampaikan dalam wadah simbolik. Ketua MPR yang memiliki peran otoritatif dalam membuka sidang ini, setidaknya menjadi figur kunci yang mengatur arah wacana sejak awal acara. Di hadapan delegasi dari 35 negara, setiap kalimat yang disampaikan memiliki bobot politis dan strategis yang secara implisit menggarisbawahi prinsip yang dijunjung tinggi oleh Indonesia. Pada kesempatan ini, Ketua MPR menyampaikan pesan humanisme: isu yang menjadi simbol solidaritas global dan menjadi bagian dari identitas diplomatik Indonesia di kancah internasional. Momen ini tidak hanya menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Palestina, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip humanisme, bahkan di hadapan negara-negara yang bersikap netral atau pro-Israel. Dengan demikian, momen ini lantas bukan dianggap sekadar formalitas saja, melainkan sebagai media untuk merepresentasikan identitas kebangsaan yang mendukung perdamaian global, sekaligus memberikan pernyataan tegas yang diperhitungkan secara diplomatis.

Section 1.1: Pidato Ketua MPR Ahmad Muzani

“Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin kompleks, salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka.”

Dalam konteks hubungan internasional yang kian kompleks, perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan hak asasi setidaknya menjadi topik yang menyatukan berbagai ideologi dan menyoroti kepentingan global. Hal ini kemudian terungkap bagaimana wacana seputar Palestina di kancah internasional tidak sekadar laporan faktual, tetapi juga mengandung struktur-struktur kekuasaan, ideologi, dan strategi politik yang sublim. Dalam dimensi teks, diksi yang digunakan dalam pidato resmi sering mengandung makna tersirat yang mempengaruhi persepsi khalayak terhadap isu yang dibawa. Misalnya, istilah seperti “perjuangan,” “hak asasi,” atau “kemerdekaan” setidaknya memiliki konotasi kuat yang menekankan pada prinsip etis, sekaligus menciptakan empati solidaritas global dengan melampaui batas-batas politik yang ada.

Pada dimensi kognisi sosial, wacana ini dipengaruhi oleh pengetahuan kolektif serta stereotip yang telah terbentuk lama mengenai konflik Palestina-Israel yang secara tidak langsung membentuk sikap serta pendapat masyarakat internasional. Beberapa

negara yang mendukung Palestina setidaknya memiliki pola kognisi yang mengaitkan Palestina dengan perjuangan melawan ketidakadilan, sedangkan negara yang mendukung Israel dapat melihat isu tersebut melalui sebuah perspektif keamanan. Van Dijk menunjukkan bahwa proses kognitif ini tidak sepenuhnya netral; mereka kerap kali dimanfaatkan untuk memperkuat ideologi tertentu yang mempengaruhi arah kebijakan suatu negara (Van Dijk, 2008), dalam konteks ini adalah isu humanisme absolut yang terjadi di Timur Tengah.

Dimensi terakhir, konteks sosial, setidaknya menunjukkan bagaimana perjuangan Palestina menjadi sebuah instrumen yang digunakan oleh negara atau lembaga untuk merepresentasikan keberpihakan atau posisi suatu region dalam percaturan global. Negara-negara yang mendukung Palestina kerap kali menyuarakan pesan ini dalam momen yang strategis, seperti forum internasional atau pelantikan pemimpin, sebagai bagian dari strategi diplomatik yang propagandis. Dalam situasi ini, isu Palestina tidak sekadar sebagai representasi kemanusiaan, tetapi juga sebagai alat diplomasi untuk mengukuhkan posisi negara dalam blok-blok kekuasaan internasional. Bagaimana kemudian pesan solidaritas untuk Palestina tidak melulu seputar hak asasi saja, melainkan terstruktur dalam konteks kekuasaan dan ideologi yang terus membentuk citra politik global.

Section 1.2: Pidato Ketua MPR Ahmad Muzani

“Kita semua tahu, bahwa Palestina bukan masalah regional, tetapi juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak rakyat Palestina.”

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Indonesia membingkai perjuangan Palestina sebagai isu kemanusiaan yang universalistik; tidak hanya sebagai konflik regional saja. Pada dimensi teks, kata-kata seperti “keadilan,” “kemanusiaan,” “tanggung jawab moral,” dan “hak” memiliki konotasi yang kuat dalam menarik simpati audiens yang kemudian mengarahkan kepada persepsi bahwa dukungan terhadap Palestina bukan lagi dipersepsi sebagai tanggung jawab politik, melainkan sebagai kewajiban moral etis yang kolektif. Karena pada dasarnya, bahasa yang digunakan dalam wacana memiliki fungsi untuk membangun relasi emosional dengan audiens (Zidan & Khasanah, 2023), dalam konteks ini adalah menjadikan dukungan terhadap Palestina sebagai tindakan untuk menegakkan prinsip humaniter sebagai nilai global yang ingin dicapai.

Pada dimensi kognisi sosial, pernyataan ini menggambarkan kesadaran kolektif yang lebih luas, bahwa posisi Indonesia dalam isu Palestina memiliki kaitan dengan identitas nasional sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip humanisme. Model wacana Van Dijk menunjukkan bahwa pola pikir kolektif ini secara tidak langsung membentuk persepsi dan sikap publik terhadap isu sosial yang diangkat (Khotimah & Karisma, 2024), dalam konteks ini adalah konflik kemanusiaan yang ada setidaknya menciptakan dukungan moral yang dianggap sebagai bagian dari integritas nasional suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pro-Palestina dari Indonesia merupakan cerminan nilai yang dianggap inheren dalam identitas bangsa.

Pada dimensi konteks sosial, pernyataan ini memposisikan Indonesia sebagai penggerak yang aktif dalam konteks diplomasi kemanusiaan dengan upaya untuk “memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan.” Dengan menjadikan isu Palestina sebagai bagian integral dari misi diplomasi Indonesia, negara ini setidaknya secara strategis menempatkan diri sebagai pemimpin moral di kancah internasional. Strategi diplomasi ini bukan hanya dianggap sekadar dukungan politik, tetapi juga alat untuk mendorong komunitas internasional untuk bergerak bersama dengan menciptakan momentum dan pengaruh yang lebih besar lagi.

Section 1.3: Pidato Ketua MPR Ahmad Muzani

“Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita.”

Pernyataan ini secara strategis memanfaatkan kekuatan bahasa dalam membangun harapan kolektif, sekaligus menegaskan posisi moral yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Pada dimensi teks, penggunaan kata-kata seperti “mimbar terhormat,” “melanjutkan komitmen perjuangan,” dan “kebijakan politik luar negeri” setidaknya memperlihatkan struktur bahasa yang penuh seremonial namun sarat akan muatan politis. Bahasa yang digunakan dalam pernyataan ini tidak sekadar berfungsi untuk mengungkap dukungan terhadap Palestina, melainkan menciptakan narasi bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina sudah seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam hal ini, wacana dukungan menjadi lebih kuat karena disampaikan di mimbar resmi, mempertegas bahwa isu ini tidak hanya menjadi aspirasi rakyat, tetapi diharapkan menjadi komitmen negara secara berkelanjutan.

Pada dimensi kognisi sosial, wacana ini memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pemimpin mereka, khususnya Prabowo, dengan menciptakan harapan bahwa komitmen terhadap Palestina adalah tanggung jawab moral yang melekat dalam peran presiden. Pola kognisi ini turut memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya solidaritas terhadap Palestina, menciptakan persepsi bahwa tindakan ini bukan sekadar kebijakan, melainkan perpanjangan dari nilai dan identitas bangsa yang mendukung hak asasi. Van Dijk menjelaskan bahwa pola pikir ini bisa secara efektif membentuk dan memperkuat ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin politik.

Dalam konteks sosial, pernyataan ini membangun legitimasi bahwa posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina harus tetap berada di garda depan. Dengan membawa isu ini ke ranah kebijakan luar negeri, Indonesia tidak hanya mengukuhkan dukungannya tetapi juga menciptakan pengaruh ideologis di kancah internasional. Analisis wacana Van Dijk menunjukkan bahwa pernyataan semacam ini tidak hanya sekadar mengungkapkan dukungan, tetapi juga turut membentuk struktur ideologis dalam rangka kebijakan luar negeri yang menempatkan isu Palestina sebagai prioritas yang tidak bisa diabaikan.

Sebagai suatu konklusi dalam sesi pertama ini, dalam konteks wacana dukungan Indonesia terhadap Palestina yang disampaikan oleh Muzani di atas, setidaknya berkesinambungan dengan konsep hegemoni ruang kekuasaan yang menurut Antonio Gramsci: bagaimana sejatinya ruang diplomasi dapat digunakan untuk membentuk

kesadaran kolektif dan membangun pengaruh yang lebih kompleks (Fansuri, 2017). Gramsci berpendapat bahwa hegemoni bukan sekadar dominasi fisik atau politik, tetapi juga dominasi ideologis yang bekerja melalui ruang-ruang sosial, budaya, dan politik untuk menciptakan pandangan dunia tertentu (Valeriano, 1982). Dalam hal ini, gedung MPR sebagai ruang diplomatik dan platform internasional yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina setidaknya menjadi instrumen strategis dalam menyebarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ketika Indonesia menyuarakan dukungan kepada Palestina dalam momen-momen resmi seperti pelantikan presiden seperti ini, maka ruang yang dipersepsikan tidak sekedar berfungsi sebagai media penyampaian pesan, tetapi juga sebagai arena hegemonik untuk membentuk opini publik dan mendapatkan persetujuan kolektif (Lefebvre, 2014), dalam hal ini mengenai pentingnya isu Palestina.

Hegemoni ruang dalam konteks ini menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya menciptakan konsensus melalui “kekuasaan ideologis” yang memperkuat posisi dan identitasnya sebagai negara yang berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menggunakan gedung MPR sebagai ruang yang diplomatik, Pemerintah Indonesia tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap Palestina tetapi juga memperluas wacana kemanusiaan ini ke ranah internasional sekaligus memberikan *space* kepada negara-negara lain untuk “bergabung” dalam solidaritas global. Dalam pandangan Gramsci, ruang diplomatik seperti ini menjadi tempat dimana nilai-nilai yang didukung Indonesia, seperti kemerdekaan dan hak asasi manusia, dapat diinstitutionalisasi sebagai norma yang universalistik.

2. Pidato Prabowo Subianto: Membangun Humanisme dalam Waktu Sakral

Sebagai kepala negara yang baru dilantik, Prabowo memiliki peran yang sangat strategis dalam menegaskan arah kebijakan dan komitmen moral etis Indonesia di hadapan perwakilan negara-negara dunia. Dalam momen ini, Prabowo tidak hanya berbicara sebagai seorang pemimpin nasional, tetapi juga sebagai simbol suara Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan dan hak asasi manusia bagi Palestina. Momen ini menjadi titik krusial karena tidak hanya memproyeksikan solidaritas Indonesia, tetapi juga membangun opini publik internasional tentang posisi Indonesia di kancah diplomasi global. Dalam perspektif wacana kritis, sambutan Prabowo ini mengandung banyak sekali pesan yang membentuk persepsi dan kesadaran kolektif tentang isu Palestina, sekaligus memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip humanisme.

Section 2.1: Pidato Presiden Prabowo Subianto

“Saudara-saudara, hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini, kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan. Serta, 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah aktivitas kehidupan mereka. Di tengah banyak masalah yang dihadapi, mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia.”

Pernyataan ini menggunakan strategi bahasa yang bertujuan membangun citra positif bangsa Indonesia di hadapan audiens nasional maupun internasional, sekaligus menunjukkan penghormatan yang diberikan oleh negara lain terhadap Indonesia. Pada dimensi teks, frasa seperti “kehormatan yang sangat besar,” “pelantikan presiden,” serta “menghormati bangsa dan rakyat Indonesia” menekankan nilai-nilai kehormatan dan

pengakuan (*confession*) yang menempatkan Indonesia sebagai region yang dihormati secara global. Pilihan diksi ini menciptakan makna yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus merepresentasikan bahwa kehadiran para perwakilan negara sebagai bentuk penghormatan, bukan terhadap acara kenegaraan, tetapi juga kepada bangsa Indonesia secara prinsip.

Pada dimensi kognisi sosial, wacana ini menciptakan persepsi yang mengangkat status Indonesia dengan membangun kebanggaan nasional bahwa negara ini dipandang penting dan dihormati oleh negara-negara lain. Narasi tersebut seperti menjelaskan bahwa pola pikir seperti ini dapat memengaruhi cara masyarakat dalam melihat posisi Indonesia di mata dunia, juga memperkuat identitas kolektif sebagai negara yang memiliki pengaruh dan kedudukan yang diakui. Di sini, pengaruh kognitif dari bahasa yang digunakan seperti diarahkan untuk membentuk rasa percaya diri nasional dan kesadaran bahwa kehormatan ini bukan sekadar untuk pejabat tertentu, tetapi memang mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Pada dimensi sosial, pernyataan ini secara strategis menggunakan kehadiran tokoh-tokoh asing sebagai simbol untuk memperkuat wacana pengakuan global terhadap Indonesia. Dalam wacana kritis, Van Dijk menyoroti bagaimana elemen-elemen sosial seperti ini tidak hanya menjadi peristiwa sebagai sesuatu yang bersifat faktual saja, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk kesadaran yang kolektif (Van Dijk, 2008), dalam konteks ini adalah tentang posisi Indonesia. Dengan menggarisbawahi bahwa para tokoh tersebut datang “di tengah aktivitas kehidupan mereka” dan “di tengah banyak masalah yang dihadapi,” maka pernyataan ini tidak dianggap hanya menginformasikan kehadiran mereka saja, melainkan lebih menegaskan pengorbanan yang dilakukan demi menunjukkan penghormatan mereka terhadap Indonesia. Hal ini menciptakan efek sosial yang sublim, bahwa Indonesia adalah negara yang layak dihormati, bahkan dalam suasana tantangan global yang kompleks. Pernyataan di atas berfungsi sebagai pengantar yang politis sekali dalam hal menggiring psikosomatik publik dengan melakukan pujaan sedemikian rupa dengan tujuan yang agitatif.

Section 2.2: Pidato Presiden Prabowo Subianto

“Kita anti penindasan, karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Bahkan ketika kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan, dimana disebut honden en inlander verboden (anjing dan pribumi dilarang masuk). Saya masih ingat dan lihat prasasti di Kolam Renang Manggarai tahun 1978, honden en inlander verboden, saudara-saudara. Karena itu, kita punya prinsip, kita harus soliter, kita harus membela rakyat-rakyat Indonesia tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.”

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana pengalaman historis dapat membentuk solidaritas dan komitmen terhadap isu-isu penindasan internasional. Pada dimensi teks, penggunaan diksi seperti “anti penindasan,” “anti rasialisme,” dan “tertindas” menciptakan kesan bahwa perjuangan rakyat Palestina dirujuk sebagai bagian dari perjuangan universal melawan ketidakadilan, yang mana hal ini juga pernah dialami bangsa Indonesia. Bentuk narasi ini memungkinkan untuk menekankan pentingnya pemilihan diksi dan referensi historis dalam membentuk wacana solidaritas—frasa “lebih rendah dari anjing” serta “honden en inlander verboden” merupakan referensi yang menyakitkan namun efektif, dimana menghubungkan pengalaman bangsa Indonesia dengan perjuangan rakyat Palestina. Dengan menyebutkan prasasti yang diskriminatif,

maka wacana ini tidak hanya mengingatkan audiens mengenai luka historis, melainkan menggarisbawahi prinsip moral etis yang kuat: bahwa pengalaman ketertindasan bangsa Indonesia menjadi landasan primordial bagi mereka dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Pada dimensi kognisi sosial, wacana tersebut lebih merepresentasikan bahwa pengalaman kolektif dari penindasan atau diskriminasi setidaknya dapat membentuk pola pikir masyarakat untuk bersimpati kepada pihak lain yang tertindas. Dengan menghubungkan pengalaman historis bangsa Indonesia dengan kondisi Palestina, maka pernyataan ini seperti mengajak pendengarnya untuk merasakan empati sebagai sesama manusia, sekaligus menghubungkan dalam konteks melihat derita yang dialami Palestina sebagai wujud dari prinsip kemanusiaan yang harus diyakini bersama. Kesadaran kognitif ini memengaruhi bagaimana masyarakat meresepsi peran dan tanggung jawab moral etis mereka di tingkat global, sekaligus mendorong komitmen untuk melawan ketidakadilan.

Pada dimensi konteks sosial, wacana ini memanfaatkan memori kolektif bangsa dalam membangun solidaritas politik yang lebih luas. Dengan membawa pengalaman diskriminasi yang pernah dialami Indonesia ke dalam wacana internasional, maka pesan ini memosisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tanggung jawab penuh mendukung Palestina berdasarkan prinsip historis, moralitas, dan kesamaan nasib. Model wacana seperti ini juga menunjukkan bahwa narasi yang dibawa oleh Prabowo Subianto tidak hanya berfungsi untuk memperkuat ikatan emosional dan historis terhadap isu Palestina, tetapi juga untuk menegaskan posisi ideologis Indonesia di hadapan dunia. Narasi ini membangun persepsi yang lebih psikologis bahwa mendukung Palestina bukan hanya dilakukan sebagai suatu sikap politik saja, tetapi merupakan bagian integral dari identitas bangsa Indonesia yang menolak diskriminasi dan berdiri melawan penindasan dalam segala bentuknya, dengan landasan kesamaan nasib.

Section 2.3: Pidato Presiden Prabowo Subianto

“Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan hari ini, kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah dengan resiko yang sangat tinggi. Dokter dan perawat kita, sudah bekerja sama di Gaza dan Rafah bersama saudara kita dari Uni Emirates Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak, dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan rumah sakit tentara kita, dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil.”

Pernyataan ini menggunakan citra positif pemerintah Indonesia sebagai negara yang proaktif dan responsif dalam membantu rakyat Palestina di Gaza dan Rafah. Pada dimensi teks, frasa seperti “bantuan yang lebih banyak,” “tim medis,” dan “siap untuk evakuasi” menunjukkan dukungan konkret yang diberikan oleh Indonesia. Dalam konteks ini, penggunaan diksi lebih menyiratkan komitmen dan tindakan nyata sebagai sarana untuk menegaskan posisi Indonesia dalam solidaritas internasional, sekaligus menunjukkan bahwa bantuan ini bukan sekadar wacana atau retorika, melainkan tindakan nyata yang melibatkan pengorbanan dan risiko tinggi bagi para tenaga medis.

Pada dimensi kognisi sosial, pernyataan ini memengaruhi persepsi audiens terhadap peran Indonesia sebagai negara yang memiliki kepedulian penuh terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Konteks ini menjelaskan bahwa pemahaman kolektif tentang “saudara kita” di Palestina memperkuat ikatan emosional dan solidaritas dengan korban perang. Hal ini akhirnya lebih mengarahkan masyarakat untuk memandang bantuan yang dikirim bukan sekadar aksi yang diplomatis, melainkan sebagai wujud empati dan rasa

tanggung jawab sebagai bangsa yang menghargai prinsip humaniter. Narasi ini memperkuat persepsi bahwa dukungan terhadap Palestina juga bukan sebagai agenda politik saja, tetapi lebih sebagai panggilan moral dan kewajiban bersama sebagai entitas yang pernah merasakan keterjajahan.

Pada dimensi konteks sosial, pernyataan ini setidaknya menciptakan wacana yang lebih kompleks dengan menggarisbawahi posisi Indonesia dalam peran aktif diplomasi kemanusiaan. Konteks sosial dalam pernyataan ini juga turut membentuk persepsi bahwa Indonesia bukan pihak yang dianggap netral, melainkan sebagai pendukung aktif yang memberikan solusi langsung bagi mereka yang menderita akibat konflik kemanusiaan yang absolut. Penyebutan kerja sama dengan Uni Emirat Arab dan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia juga semakin mempertegas bahwa dukungan ini melibatkan kerja sama internasional dan kesiapan domestik, sekaligus menunjukkan citra yang politis, bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat peduli terhadap aspek humanitas. Konteks ini juga kemudian turut membentuk empati bagi negara-negara lain untuk “memperhatikan” terhadap sesuatu yang memang perlu diperhatikan.

Berdasarkan seluruh wacana yang disampaikan dalam sesi kedua ini, dominasi waktu yang terjadi ketika pidato tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai kepala negara yang baru, setidaknya memberikan kekuatan tersendiri terhadap pesan sosial yang diusung, dimana perhatian peserta acara (baca: perwakilan negara sahabat) kemudian terkonsentrasi pada satu peristiwa yang monumental. Pemilihan waktu yang strategis ini setidaknya meningkatkan kemungkinan pesan sosial tersebut untuk diinternalisasi oleh peserta acara yang hadir, karena disampaikan dalam momen yang sakral dan berkesan; pada saat ketika fokus kolektif diarahkan pada momen kebangsaan (baca: pidato presiden). Fenomena seperti ini kemudian menempatkan objek (peserta acara) sebagai entitas yang diberangus secara haknya psikosomatik dan emosional. Dominasi waktu yang terjadi ini semata-mata dilatarbelakangi oleh ketidaksadaran suatu entitas dalam meresepsi pengalaman ruang-ruang sosialnya (Lefebvre, 2014).

Selain itu, konsep tentang dominasi waktu dalam penelitian ini juga memberikan implikasi penting bahwa pesan yang disampaikan pada momen yang tepat, dalam konteks acara kenegaraan resmi, setidaknya mampu menembus batasan-batasan diplomatik dan politik yang memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten mendukung Palestina, yang kemudian memiliki maksud agar bangsa lain dapat menirunya secara tidak langsung. Maka, melalui pidato propagandis dalam momen yang krusial tersebut, pesan kemanusiaan ini mendapatkan kedalaman makna yang lebih besar dan kompleks, sekaligus membentuk daya tarik emosional dan simbolik yang kuat dalam wacana internasional.

E. KESIMPULAN

Dominasi ruang dan waktu berperan sangat krusial dalam memperkuat pesan kemanusiaan yang disampaikan selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke-8. Melalui momen sakral yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara; pro, netral, maupun kontra, pemerintah Indonesia setidaknya memanfaatkan kesempatan sublim ini untuk menekankan solidaritasnya terhadap Palestina. Dalam konteks wacana kritis, dominasi ruang tercermin dalam pemilihan lokasi di gedung MPR RI yang memiliki nilai simbolis sebagai pusat kedaulatan bangsa dan tempat berkumpulnya representasi internasional. Sedangkan, dominasi waktu direpresentasikan

melalui pemilihan dua momen penting: pembukaan sidang oleh Ketua MPR dan pidato kenegaraan presiden. Kedua momen ini tidak hanya menciptakan ruang yang kondusif bagi penyampaian pesan, melainkan memperkuat daya pikat dan urgensi pesan humanisme yang disampaikan. Melalui pengaturan ruang dan waktu yang tepat, pemerintah Indonesia berhasil menjadikan dukungan terhadap Palestina sebagai bagian dari identitas kebangsaannya di mata internasional secara *face to face*. Hal ini sekaligus memperkuat persepsi bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina bukan sekadar retorika politik, tetapi merupakan bagian integral dari komitmen moral etis yang disampaikan secara simbolis melalui dominasi ruang dan waktu yang efektif.

F. SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan ragam perspektif yang lain dalam membaca fenomena tersebut secara lebih komprehensif, sehingga perhatian akademis terhadap isu-isu kenegaraan semakin marak sekaligus menjadikan langgam atau nafas baru dalam bidang riset dan pendidikan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., & Hermawan, R. (2024). Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 87–102. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/4762>
- Azizah, S. N., Ningsih, M., & Lailin, M. I. A. H. (2024). Mobilisasi Dukungan dan Simpati Publik Terhadap Palestina pada Akun@ Erlanishere di Twitter. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(4), 33–45. <https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Filosofi/article/view/291>
- Brummer, M., & Oren, E. (2023). Beyond Power, Before Interdependence: Complex Synergy and Japan–Israel Relations. In *Japan and the Middle East: Foreign Policies and Interdependence* (pp. 163–205). Springer.
- Dalacoura, K. (2021). Turkish foreign policy in the Middle East: power projection and post-ideological politics. *International Affairs*, 97(4), 1125–1142.
- Fansuri, H. (2017). Konsumerisme dan Hegemoni Barat terhadap Masyarakat Negara Berkembang: Perspektif Antonio Gramsci. *Journal of Integrative International Relations*, 3(2), 33–51.
- Gilboa, E. (2023). US-Israel relations at 75. *Israel Affairs*, 29(3), 473–491.
- Jones, C. (2021). Getting the Better of the Bargain: Technical Intelligence, Arms Sales, and Anglo-Israeli Relations 1967–1974. *Diplomacy & Statecraft*, 32(3), 531–553.
- Khan, F. G. (2022). Israel-Palestine Conflict and the Role of International Organizations. *PRSS: Pakistan Review of Social Science*, 3(1). <https://www.pakistanreview.com/index.php/PRSS/article/view/144>
- Khotimah, K., & Karisma, D. A. (2024). Konstruksi Narasi Politik dalam Tayangan Youtube bertajuk '3 Bakal Calon Presiden Bicara Gagasan' di Narasi Mata Najwa. *Scientia*, 3(2).
- Lefebvre, H. (2014). The production of space (1991). In *The people, place, and space reader* (pp. 289–293). Routledge.
- Masnani, S. W., Agussalim, A., & Mutmainnah, I. A. (2024). Semangka: Representasi Solidaritas Palestina Melalui Trikotomi Tanda Charles Sanders Pierce. *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, 21(2), 113–124. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/36086>
- Ridhwani, I. (2024). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'ah. *Pro*

- Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 4(1), 57–69. <https://jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/812>
- Rosita, M., & Purbasari, I. (2024). Inkoherensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dan Sertifikasi Produk Halal. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 75–87. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/3937>
- Setiawan, F., Prasetya, A. D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis wacana kritis model Teun Van Dijk pada pemberitaan kasus pencabulan santri oleh anak Kiai Jombang dalam media online. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(2), 224–237. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/21772>
- Sormin, S. K., & Malik, F. D. M. (2024). Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3114–3120. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12443>
- Sumadi, D. A. H. (2024). *PEMETAAN GERAKAN SOSIAL INDONESIA SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PALESTINA TAHUN 2023-2024*. Universitas Bakrie. <https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/10377>
- Syauqiyah, A. F., & Silvya, D. (2024). Diplomasi Publik Elcorps Melalui Palestine Scarf (2023) Merek Elzatta untuk Menyuarakan Dukungan Terhadap Palestina. *Catha: Journal of Creative and Innovative Research*, 1(3), 113–120. <http://j-catha.org/index.php/catha/article/view/35>
- Thoyyibah, I., Maharani, S. D., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2023). Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 9(2), 41–54. <https://jurnal.radenwijaya.ac.id/index.php/PSSA/article/view/1013>
- Valeriano, R. (1982). *The Concepts of Ideology, Hegemony, and Organic Intellectuals in Gramsci's Marxism*. Marxist.Org. <https://www.marxists.org/history/erol/periodicals/theoretical-review/1982301.htm>
- Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 4(2), 249–283. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0957926593004002006>
- Van Dijk, T. A. (2008). Discourse and context. *A Sociocognitive Approach*. Cambridge.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. *The Handbook of Discourse Analysis*, 466–485. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118584194.ch22>
- Wati, E. S., & Burdah, I. (2024). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. *Power in International Relations*, 8(2), 19–33.
- Zidan, S. M. M., & Khasanah, U. (2023). Gaya Bahasa dan Fungsi Iklan pada Majalah LifeWear Uniqlo: Language Style and Function of Advertisements in Uniqlo's LifeWear Magazine. *Proceeding of Undergraduate Conference on Literature, Linguistic, and Cultural Studies*, 2(1), 437–474.